



dr. H.M. Zairullah Azhar
BUPATI TANAH BUMBU



**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD)
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2020**



H. Muh. Rusli
WAKIL BUPATI TANAH BUMBU

KATA PENGANTAR

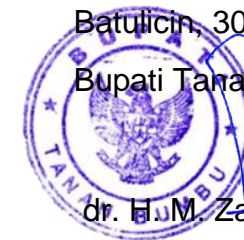
Berkenaan dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2020, kami selaku Bupati berkewajiban memberikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada Masyarakat selama 1 (satu) tahun anggaran.

Penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (RLPPD) ini dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Bupati Tanah Bumbu selaku Kepala Daerah yang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 69 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Melalui dukungan semua pihak, segala kemajuan dan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di berbagai bidang telah tercapai tahun 2020 yang lalu. Selain dilandasi dengan kesadaran dan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas ini, kami pun menyadari masih terdapat berbagai kekurangan termasuk pula dalam penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaannya di masa yang akan datang.

Batulicin, 30 Maret 2021

Bupati Tanah Bumbu,



dr. H.M. Zairullah Azhar

A. VISI DAN MISI KABUPATEN TANAH BUMBU

1. Visi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, visi Kabupaten Tanah Bumbu adalah:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH BUMBU SEBAGAI POROS MARITIM UTAMA SERTA PUSAT PERDAGANGAN, INDUSTRI, DAN PARIWISATA DI KALIMANTAN BERBASIS PADA KEUNGGULAN LOKAL DAN POTENSI STRATEGIS DAERAH MENUJU TANAH BUMBU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERINTELEKTUAL TINGGI (MADANI)”

2. Misi

Dalam rangka mencapai Visi dimaksud, dirumuskan misi yang berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu dalam 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal *point* guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata.
- b. Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional.
- c. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta memperhatikan Kearifan Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan.
- d. Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal.
- e. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

Kabupaten Tanah Bumbu terbentuk secara sah dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) yang dipimpin oleh seorang Kepala Daerah yang menjalankan tugas dan kewajiban pemerintahan sesuai peraturan perundangan.

Kabupaten Tanah Bumbu adalah satu dari 13 (tiga belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak di ujung tenggara Pulau Kalimantan, diantara 3°01'59,21"-3°51'43.93" Lintang Selatan dan 115°15'00"-116°05'8,32" Bujur Timur, 6 (enam) pulau kecil yaitu Pulau Suwangi dan Pulau Anak Suwangi di Kecamatan Batulicin, Pulau Burung, Pulau Tampakan dan Pulau Hantu di Kecamatan Simpang Empat, serta Pulau Suraja Syarif Ali di Kecamatan Sungai Loban, dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara	:	Kabupaten Kotabaru
Sebelah timur	:	Kabupaten Kotabaru
Sebelah selatan	:	Laut Jawa
Sebelah barat	:	Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Banjar

Secara administratif, Kabupaten Tanah Bumbu yang mempunyai luas wilayah ± 4.890,30 Km² (489.030 Ha) terbagi atas 10 kecamatan, 5 kelurahan, 144 desa, 95 RW dan 1.333 RT. Ditinjau dari topografinya, wilayah Kabupaten Tanah Bumbu terdiri atas daerah pantai, daerah lereng (kontur sedang) dan perbukitan (kontur rapat). Sebagian besar daerah adalah termasuk dataran rendah, dengan kondisi kelerengan 0-8% seluas 401.103,14 ha (termasuk mangrove dan rawa) dan kelerengan lebih dari 40% yang mencakup 197,23 ha. Sedangkan menurut ketinggian dari permukaan laut, daerah dengan ketinggian lebih dari 0-150 meter merupakan daerah terluas kurang lebih 408.979,51 ha, sedangkan daerah dengan ketinggian lebih dari 625 m seluas kurang lebih 9.359,5 ha. Terdapat dua buah gunung yang ketinggiannya mencapai lebih dari 625 m yaitu Gunung Walungin dan Gunung Kandis masing-masing ketinggiannya 1.184 m dan 1.170 m, dengan jumlah gunung seluruhnya 15 buah.

Berdasarkan Data Agregat kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020, jumlah penduduk Tanah Bumbu sebanyak 325.346 jiwa, meningkat sebesar 0,73 persen dibandingkan jumlah penduduk tahun 2019 yang berjumlah 320.452 jiwa atau bertambah sebanyak 4.894 jiwa.

C. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Bumbu secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2020	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	70,50	70,71	0,21
2	Angka Kemiskinan	4,85	4,60	0,25
3	Angka Pengangguran	6,18	6,95	0,77
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,63	(-1,46)	- 5,09
5	Pendapatan Per kapita	55.651,42	54.002,24	- 1649,18
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.346	0.300	0,046

D. CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan dasar memuat data/informasi kinerja antara lain sebagai berikut:

PENDIDIKAN

- Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD sebesar 96,00 %
- Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar sebesar 92,78 %
- Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama sebesar 69,2 %
- Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan sebesar 100 %

KESEHATAN

- Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan sebesar 0,07 %
- Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi sebesar 33,33 %
- Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 75,94 %
- Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sebesar 79,23 %

- Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 81,03 %
- Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar sebesar 74,46 %
- Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 42,89 %
- Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar 28,95 %
- Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar 53,40 %
- Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 18,19 %
- Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 79,59 %
- Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar sebesar 81,51 %
- Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar sebesar 24,81 %
- Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar sebesar 90,16 %

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi sebesar 28,20 %
- Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten sebesar 75,88 %
- Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik sebesar 87,58 %
- Rasio kepatuhan IMB kabupaten sebesar 100 %
- Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten sebesar 47,71 %
- Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi 16,26 %
- Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi sebesar 0 %

PERUMAHAN RAKYAT

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten sebesar 40 %
- Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten sebesar 8,15 %
- Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani sebesar 1,24 %
- Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) sebesar 4,20 %
- Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) sebesar 1,009 %

KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

- Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan sebesar 100 %
- Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sebanyak 1260 orang
- Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebanyak 200 orang
- Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban sebesar 96,08 %
- Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebesar 96,8 %
- Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran selama ± 15 menit

SOSIAL

- Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM) sebesar 100 %
- Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota sebesar 100 %

E. HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berikut disajikan table hasil pemeringkatan penilaian EKPPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2018.

HASIL PEMERINGKATAN EKPPD KABUPATEN TANAH BUMBU 2011-2018

NO	TAHUN	SKOR	STATUS
1	2011	2.6196	TINGGI
2	2012	2.8361	TINGGI
3	2013	3.0506	SANGAT TINGGI
4	2014	3.0818	SANGAT TINGGI
5	2015	3.1324	SANGAT TINGGI
6	2016	3.2376	SANGAT TINGGI
7	2017	3.0442	SANGAT TINGGI
8	2018	3.3104	SANGAT TINGGI

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan laporan yang tersruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan dan bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna (*stake holder*) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Berikut disajikan tabel hasil opini atas laporan keuangan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2018:

HASIL OPINI ATAS LKPD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2011-2018

NO	TAHUN	HASIL OPINI
1	2011	WAJAR DENGAN PENGECCUALIAN (WDP)
2	2012	WAJAR DENGAN PENGECCUALIAN (WDP)
3	2013	WAJAR DENGAN PENGECCUALIAN (WDP)
4	2014	WAJAR TANPA PENGECCUALIAN (WTP)
5	2015	WAJAR TANPA PENGECCUALIAN (WTP)
6	2016	WAJAR TANPA PENGECCUALIAN (WTP)
7	2017	WAJAR TANPA PENGECCUALIAN (WTP)
8	2018	WAJAR TANPA PENGECCUALIAN (WTP)
9	2019	WAJAR TANPA PENGECCUALIAN (WTP)

F. REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan pada tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2020

NO	JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN	1.564.315.710.279,00	1.606.298.204.225,69	102,68
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	145.745.791.574,00	167.607.925.202,69	114,83

-	Pendapatan Pajak Daerah	43.645.321.878,00	57.624.010.181,11	132,03
-	Pendapatan Retribusi Daerah	10.657.045.640,00	7.719.659.481,00	72,44
-	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.037.158.490,00	3.037.158.490,00	100,00
-	Lain-lain PAD Yang Sah	88.406.265.566,00	98.972.888.624,58	111,95
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.047.574.803.919,00	1.085.351.252.225,00	103,61
-	Dana bagi Hasil Pajak	112.372.501.188,00	94.570.641.866,00	84,16
-	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	376.903.540.731,00	436.366.554.731,00	115,78
-	Dana Alokasi Umum	438.026.626.000,00	435.828.658.000,00	99,50
-	Dana Alokasi Khusus	120.272.136.000,00	118.585.397.628,00	98,60
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	370.995.114.786,00	353.593.235.224,00	95,31
-	Hibah	60.525.543.669,00	51.332.624.101,00	84,81
-	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	134.739.985.208,00	124.120.783.377,00	92,12
-	Dana Penyesuaian	175.729.585.909,00	174.089.627.746,00	99,07
-	Pendapatan Lainnya	0,00	4.050.000.000,00	0,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2020

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.606.298.204.225,69 atau mencapai 102,68% dari estimasi pendapatan yang dianggarkan sebesar Rp1.564.315.710.279,00. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 167.353.716.776,69 dari estimasi pendapatan setelah perubahan sebesar Rp145.745.791.574,00 atau sebesar 114,83%. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD Yang Sah.

- b. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2020 sebesar Rp1.383.561.863.348,00 dari estimasi pendapatan setelah perubahan sebesar Rp1.358.044.375.036,00 atau 102,68%. Pendapatan Transfer tersebut bersumber dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
- c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah merupakan pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak/bukan pajak dari propinsi dan pemerintah lainnya, dana penyesuaian dan pendapatan lainnya dengan realisasi pada tahun 2020 sebesar Rp55.382.624.101,00 dari estimasi pendapatan setelah perubahan sebesar Rp50.525.543.669,00 atau sebesar 91,50%.

2. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi belanja menurut jenis belanja pada tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2020

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5
	BELANJA	1.822.289.451.360,18	1.698.573.425.976,05	93,21
1	BELANJA OPERASI	1.173.253.472.419,18	1.106.606.319.778,05	94,32
-	Belanja Pegawai	495.325.625.265,61	471.343.841.425,05	95,16
-	Belanja Barang	542.790.213.002,57	506.599.796.251,00	93,34
-	Belanja Hibah	127.707.634.151,00	123.654.382.102,00	96,83
-	Belanja Bantuan Sosial	7.500.000.000,00	5.008.300.000,00	66,78
2	BELANJA MODAL	520.735.978.941,00	504.935.572.376,00	96,97
-	Belanja Tanah	22.584.121.446,00	21.043.600.741,00	93,18
-	Belanja Peralatan dan Mesin	118.564.515.552,00	114.205.049.905,00	96,32
-	Belanja Bangunan dan Gedung	77.379.760.681,00	74.938.056.694,00	98,84
-	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	297.557.089.372,00	290.590.556.449,00	97,66
-	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.650.491.890,00	4.158.308.586,00	89,42

3	BELANJA TIDAK TERDUGA	128.300.000.000,00	87.031.533.823,00	67,83
-	Belanja Tidak Terduga	128.300.000.000,00	87.031.533.823,00	67,83
	TRANSFER	108.203.819.889,18	108.203.819.889,18	100,00
1	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	0,00	0,00	0,00
-	Transfer Bagi Hasil Ke Desa	0,00	0,00	0,00
2	TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN	108.203.819.889,18	108.203.819.889,18	100,00
-	Bantuan Keuangan ke Desa	108.203.819.889,18	108.203.819.889,18	100,00
-	Bantuan Keuangan Lainnya			

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2020

Belanja merupakan semua pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Realisasi Belanja pada tahun 2020 sebesar Rp1.698.573.425.976,05 dari rencana belanja setelah perubahan sebesar Rp1.822.289.451.360,18 atau sebesar 93,21%. Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, dengan realisasi sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Operasi tahun 2020 sebesar Rp1.106.606.319.778,05 atau 94,32% dari rencana Belanja setelah perubahan sebesar Rp1.173.253.472.419,18. Belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.
- b. Realisasi Belanja Modal pada tahun 2020 sebesar Rp504.935.572.376,00 atau sebesar 96,97% dari rencana belanja setelah perubahan sebesar Rp520.735.978.941,00. Belanja modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap Lainnya.
- c. Belanja Tak Terduga dialokasikan dalam APBD dalam rangka penanganan akibat dari bencana alam dan pelaksanaan kewenangan daerah yang belum tercakup dalam belanja operasi dan belanja modal. Realisasi Belanja Tidak Terduga selama Tahun 2020 sebesar Rp87.031.533.823,00 atau 67,83% dari rencana belanja setelah perubahan sebesar Rp128.300.000.000,00.

3. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan pada tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

NO	JENIS PEMBIAYAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
	PEMBIAYAAN			
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	376.177.560.970,18	376.177.560.970,18	100,00
-	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	376.177.560.970,18	376.177.560.970,18	100,00
-	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00
-	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00
-	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya	0,00	0,00	0

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2020

G. PENGHARGAAN YANG DITERIMA TAHUN 2020:

1. Gelar Kehormatan dari *Union Mundial De Poetas Por La Paz Y La Libertad* (UMPPL) kepada Elsi Desiyanti (Guru SDN 2 Sepunggur) atas prestasinya dalam mengikuti Lomba Puisi Internasional di Italia yang berjudul Tangan dari Surga (*Manos del Cielo*) sebagai Puisi Terbaik.
2. Gelar Kehormatan dari *Union Mundial De Poetas Por La Pazyla Libertad* (UMPPL) kepada Ahmad Riyan Nailanie (Guru SMPN 2 Kusan Hulu) atas prestasinya dalam mengikuti Lomba Puisi Internasional Penyair untuk Palestina di Italia yang berjudul "Cahaya Kebebasan" (*Luz De La Libertad*) sebagai Puisi Terbaik.
3. Gelar Kehormatan dari *Union Mundial De Poetas Por La Pazyla Libertad* (UMPPL) kepada Ahmad Riyan Nailanie (Guru SMPN 2 Kusan Hulu) atas prestasinya dalam mengikuti Lomba Puisi Internasional di Italia yang berjudul "Derajat Perempuan" (*Grandos Femininos*) sebagai Puisi Terbaik.
4. Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dengan Skor **3,3104** dan Status Kinerja **Sangat Tinggi** Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2018.
5. Penghargaan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang telah terintegrasi dengan sistem JDIHN (jdihn.go.id) Tahun 2020.

6. Penghargaan dari Badan Kepegawaian Nasional kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu atas komitmen dan kerjasama dalam pelaksanaan *Piloting* Penerapan Sistem Informasi e-Kinerja ASN Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Daerah.
7. Penghargaan dari Badan Pusat Statistik Kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Kabupaten dengan Capaian *Response Rate* yang melebihi target dalam Pelaksanaan Sensus Penduduk Online Tahun 2020.
8. Penghargaan dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Sebagai Peringkat 1 dalam Pengisian Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Tahun 2020 dengan Persentase Tertinggi.
9. Penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan Kepada Kabupaten Tanah Bumbu atas prestasi sebagai Kabupaten Terbaik 3 Tahun 2020 dalam Pembangunan Daerah.
10. Penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan Kepada Bupati Tanah Bumbu atas Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) Terbanyak 1 Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.
11. Penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan kepada Kabupaten Tanah Bumbu atas baiknya kinerja dalam penyaluran Dana Desa tercepat ke-2 se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020
12. Penghargaan dari Kapolda Kalimantan Selatan kepada Bupati Tanah Bumbu atas Sinergitas Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Wilayah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
13. Penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan kepada Kabupaten Tanah Bumbu atas partisipasinya dalam Program Kampung Iklim (PROKLIM) Kategori Utama Tahun 2020.
14. Penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan kepada SDN 8 Kampung Baru dan SDIT Dhia El Widad sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.
15. Penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan “Satu Wasaka Award” kepada Kabupaten Tanah Bumbu atas partisipasinya dalam kegiatan penuntasan akses Sanitasi dan Air Minum di Tahun 2019.